

Pemkab Mahulu Terima *Exit Meeting* BPK Terkait Kebijakan Ketahanan Pangan



Sumber gambar : TRIBUN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menerima *Exit Meeting* Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, dihadiri langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso M.Adm., Kes., yang mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, di Ruang Rapat Wakil Bupati Mahulu, Jumat (26/09).

Exit Meeting ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan BPK atas kebijakan pemerintah daerah terkait ketahanan pangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi Pemkab Mahulu serta instansi terkait dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat.

Pemeriksaan pendahuluan oleh BPK melibatkan beberapa pengikat daerah terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Bagian Ekonomi dan SDA, serta instansi lain yang berhubungan dengan ketersediaan dan distribusi pangan. Hasil pemeriksaan ini akan ditindaklanjuti dalam pemeriksaan terinci pada tahap selanjutnya.

Dalam sambutan Asisten I, Agustinus Teguh Santoso, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh BPK. Ia menegaskan bahwa dari dua aspek, yaitu

aspek ketersediaannya dan keterjangkauannya, Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat kebijakan dan strategi pembangunan pangan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi akibat kondisi geografis.

“Kami menyadari pentingnya ketahanan pangan sebagai salah satu pilar kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan pendahuluan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif,” ungkapnya.

Agustinus Teguh Santoso berharap seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan dapat menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK dengan baik. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan strategi ketahanan pangan di Mahakam Ulu semakin kuat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
(Prokopim/vta)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemkab Mahulu Terima *Exit Meeting* BPK Terkait Kebijakan Ketahanan Pangan, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) mengatur sebagai berikut:
 - (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - (3) Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.